



# Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## **RANWAL RENJA T. A. 2027** **Rancangan Awal Rencana Kerja**



<https://bpbd.kepriprov.go.id>



Jalan Tugu Pahlawan No. 18 , Kelurahan Bukit  
Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat  
Kota Tanjungpinang

## **KATA PENGANTAR**



Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 - 2029 dan Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 BPBD Provinsi Kepulauan Riau dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Oleh karena itu Ranwal Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan Program Kegiatan hingga Sub Kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau.

Ranwal Renja pada BPBD Provinsi Kepulauan Riau sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Penanggulangan Bencana dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen ini berisikan Ranwal Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan untuk memastikan bahwa Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan pada Ranwal Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2027.

Tanjungpinang, Januari 2026

**KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



*[Signature]*  
**Dr. H. MUHAMMAD HASBI, M.Si**  
Kepala Utama Madya (IV/d)  
NIP 196602281986021006

## **DAFTAR ISI**

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                    | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                  | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                 | <b>v</b>   |
| <br>                                                                       |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                             | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                  | 1          |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                  | 6          |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                               | 10         |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                           | 11         |
| <br>                                                                       |            |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA .....</b>                     | <b>13</b>  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... | 13         |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                     | 24         |
| 2.3. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....               | 25         |
| 2.4. Rancangan Awal RKPD .....                                             | 27         |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....               | 27         |
| <br>                                                                       |            |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>                 | <b>28</b>  |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....                            | 28         |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran .....                                              | 30         |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....                                            | 35         |
| <br>                                                                       |            |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>                            | <b>33</b>  |
| <br>                                                                       |            |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>                                                | <b>40</b>  |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1. Sandingan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah (2025-2029) .....                  | 5  |
| Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 .....                   | 17 |
| Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau .....                                    | 24 |
| Tabel 3.1. Rancangan Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis BNPB 2025-2029 .....         | 29 |
| Tabel 3.2. Rancangan Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program BNPB 2025-2029 .....             | 29 |
| Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Provinsi kepulauan Riau Tahun 2025-2029 .....            | 31 |
| Tabel 3.4. Program dan Indikator Program Renstra BPBD Provinsi kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ..... | 32 |
| Tabel 4.1. RANWAL Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan tahun 2027 .....               | 34 |



## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja .....                                                | 3  |
| Gambar 3.1. Penyelarasan Visi Presiden dan PRJMN dengan Visi, Misi,<br>dan Tujuan Renstra BNPB ..... | 28 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai sejak Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Pasca implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan secara preventif bukan responsif, artinya yang diperkuat adalah pencegahan dan kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana.

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggualanan bencana Sebagaimana telah disebutkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dengan amanat Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sebagai dasar Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu:

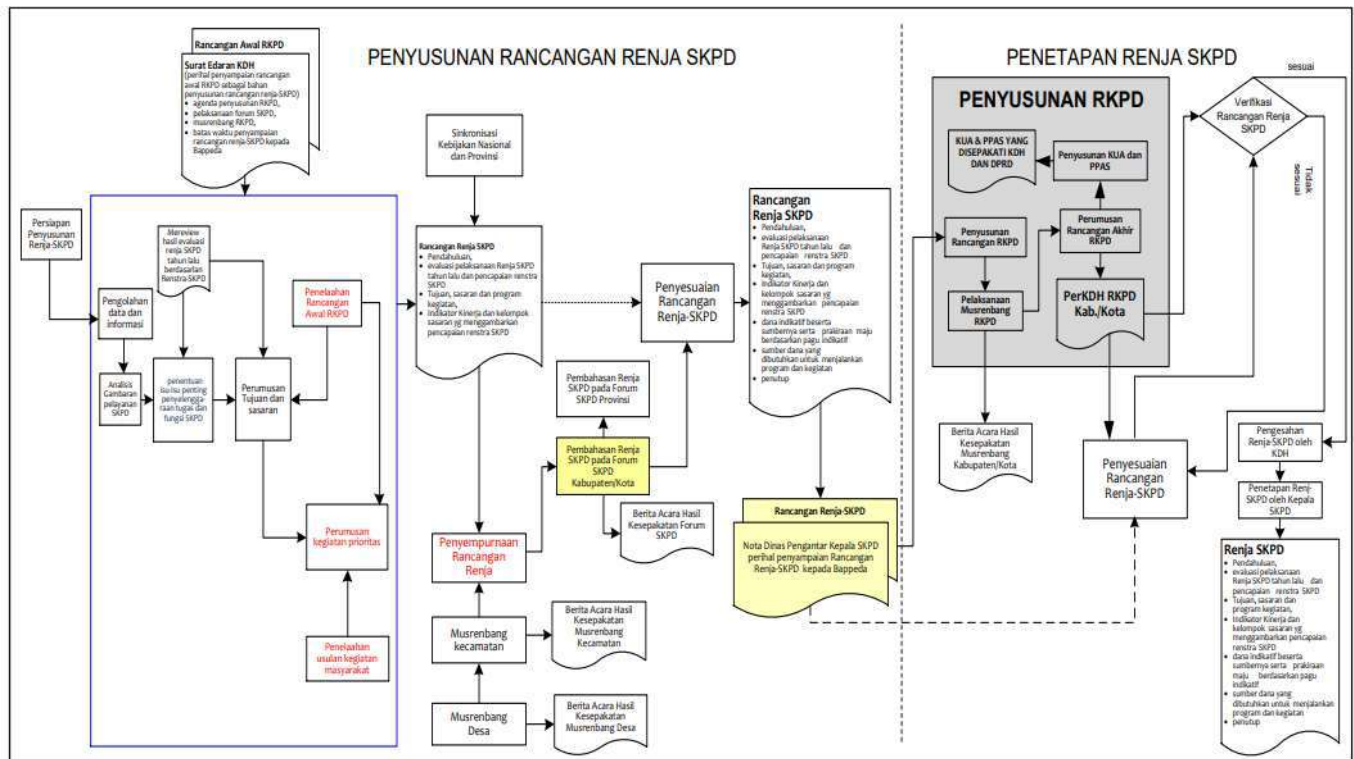
- a. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- c. Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana, kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur. Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pengoordinasian perumusan program pelaksanaan pencegahan bencana;
- c. Pengoordinasian perumusan program dan pelaksanaan tanggap darurat dan logistik dan peralatan pada saat terjadinya bencana;
- d. Pengoordinasian perumusan program dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
- e. Pengelolaan kesekretariatan; dan
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dengan membentuk Pos Komando Tanggap Darurat pada saat tanggap darurat dan melaksanakan aktivasi Posko Tanggap Darurat pada saat kondisi normal tanpa bencana.

Ranwal Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja BPBD merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 BPBD yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2025 – 2029, Renja BPBD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan di laksanakan oleh BPBD dalam satu tahun anggaran. Ranwal Renja BPBD menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja BPBD juga mengakomodir hasil Rapat Koordinasi Perangkat Daerah.

**Gambar 1.1**  
*Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja*



Tahapan penyusunan Renja BPBD tahun 2027 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Sejalan dengan visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2029

**“Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”.**

BPBD melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi dan Program Penanggulangan Bencana berkaitan dengan misi 5 (lima) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2029 yaitu “MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL SERTA EKOLOGI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”.

**Tabel 1.1**

*Sandingan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah (2025-2029)*

| <b>Visi</b><br>KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi 5</b><br>MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL SERTA EKOLOGI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN |                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tujuan RPJMD 5.2</b><br>MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN KETAHANAN DAERAH                                               |                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sasaran RPJMD 5.2.2</b><br>RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RENSTRA</b><br><b>BPBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                      | <b>Sasaran</b>                                                                                      | <b>Strategi</b>                                                                                                 | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim<br><br><b>Indikator Tujuan :</b><br>Indeks Risiko Bencana                          | Meningkatnya Kualitas Kapasitas Daerah<br><br><b>Indikator Sasaran :</b><br>Indeks Ketahanan Daerah | Terlaksananya Penguatan Kapasitas Pengelola, Pemberdayaan Masyarakat dan Regulasi dalam Penanggulangan Bencana. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi pembentukan dan penerapan Desa Tangguh Bencana melalui penyediaan tenaga fasilitator;</li> <li>2. Peningkatan kapasitas Forum PRB dan Relawan Penanggulangan Bencana di Kab/ Kota;</li> <li>3. Memberi pelatihan peningkatan kompetensi ASN dan non ASN dalam PB;</li> <li>4. Melakukan Sistem Peringatan Dini Bencana yang terintegrasi dengan PUSDALOPS;</li> <li>5. Menyusun Regulasi dan dokumen KRB, RPB, dan PRB serta Renkon per jenis bencana;</li> <li>6. Melakukan inventarisir bersama lintas sektoral dan bersinergi serta berkolaborasi dalam upaya penanggulangan bencana;</li> </ol> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <ol style="list-style-type: none"><li>7. Penguatan Kebijakan Daerah tentang RPB dan Peraturan tentang Penanggulangan Bencana daerah;</li><li>8. Melakukan pendidikan, pelatihan, sosialisasi , tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang melibatkan unsur lintas sektor/ pentahelix.</li></ol> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Rencana kerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau memiliki keterkaitan dengan kebijakan Nasional khususnya dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 merupakan pelaksanaan dari RIPB Tahun 2020-2044 yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan RENSTRA BNPB Tahun 2025 - 2029

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekontruksi;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekontruksi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1419 Tahun 2021);
  22. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;
  23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  24. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
  26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1).

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4);
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 885);
29. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Nomor 3 tahun 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
32. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 sebagai berikut:

#### **1. Maksud**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke dalam Rencana Tahunan guna memberikan

arah dalam menunjang pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar melakukan evaluasi kinerja tahun 2027.

**1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

**Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja**

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD

**Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2027**

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan tahun 2027.



#### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang Faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; rekapitulasi program dan kegiatan; Tabel rencana program dan kegiatan.

#### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2027.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi mengelola anggaran belanja langsung sebesar **Rp.9.208.666.358,00** dengan realisasi anggaran sampai dengan Akhir Tahun Anggaran sebesar **Rp.8.962.203.403,00** atau sebesar **97,32 %**, dan realisasi fisik sebesar **99,23 %**.

Berikut Uraian Realisasi Capaian Indikator Program BPBD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Tahun 2025:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
  - a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 yaitu dengan Target Indikator Predikat BB dengan Capaian BB atau 100 % dengan kategori Sangat Tinggi.
  - b. Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah, target Indikator Tahun 2025 yaitu 87,00 dengan Capaian 83,00 atau 95,40 % dengan kategori Sangat Tinggi.
  - c. Indeks Kepuasan Masyarakat, target Indikator Tahun 2025 yaitu 87,75 dengan Capaian 87,64 atau 99,87 % dengan kategori Sangat Tinggi.
2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
  - a. Indeks Pencegahan Bencana, target Indikator Tahun 2025 yaitu 2,70 dengan Capaian 2,99 atau 110,74/100 % dengan kategori Sangat Tinggi.

- b. Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, target Indikator Tahun 2025 yaitu 0,28 dengan Capaian 0,27 atau 96,43 % dengan kategori Sangat Tinggi.
- c. Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan, target Indikator Tahun 2025 yaitu 0,54 dengan Capaian 0,47 atau 87,04 % dengan kategori Tinggi.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1. Daftar program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan meliputi:

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Penyediaan Bahan/Material;
  - Fasilitas Kunjungan Tamu;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## **B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

- 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
  - Pengelolaan Risiko Bencana;
  - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana;
  - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencan;
  - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
- 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
  - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana;
  - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
  - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana;
  - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- 3) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
  - Penanganan Pasca Bencana Provinsi;
  - Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi.

2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan yaitu sebagai berikut:
  - a. Komitmen dan kerjasama dari pimpinan, pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan.
  - b. Dukungan Perangkat Daerah terkait dan pemerintah kabupaten/ kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Capaian Renstra secara umum Priode 2025 - 2029, dengan capaian pada seluruh kegiatan dapat tercapai sesuai apa yg ditargetkan pada tahun 2025.
4. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2027, perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan/ sub kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja kedepannya.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Tahun s/d 2025 terlihat pada Tabel 2.1.

**RANCANGAN AWAL (RANWAL) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**



**Tabel 2.1.**  
*Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025*

| Kode |    |    |      |      | Urusan Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                              | Satuan          | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Akhir<br>Renstra | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Tahun<br>2025 | Capaian Target Renstra<br>Tahun 2025 |                        |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                 |                                                  |                                               | Realisasi<br>Capaian                 | Tingkat<br>Capaian (%) |
| 1    |    |    |      |      | 2                                                                                           | 3                                                                                                                                                                              | 4               | 5                                                | 6                                             | 7                                    | 8                      |
| 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                             |                                                                                                                                                                                |                 |                                                  |                                               |                                      |                        |
| 1    | 05 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT   |                                                                                                                                                                                |                 |                                                  |                                               |                                      |                        |
| 1    | 05 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI                                 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                                   | Predikat        | A                                                | BB                                            | BB                                   | 100                    |
|      |    |    |      |      |                                                                                             | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia<br>Perangkat Daerah                                                                                                                 | Indeks          | 92,00                                            | 87,00                                         | 83,00                                | 95,40                  |
|      |    |    |      |      |                                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                                     | Indeks          | 91,50                                            | 87,75                                         | 87,64                                | 99,88                  |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                          | Dokumen         | 18                                               |                                               |                                      |                        |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                 | Dokumen         | 16                                               | 2                                             | 2                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA- SKPD                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                                                                        | Dokumen         | 4                                                | -                                             | -                                    | -                      |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan         | 9                                                | 1                                             | 1                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                                            | Laporan         | 18                                               | 2                                             | 2                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                   | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                       | Dokumen         | 12                                               |                                               |                                      |                        |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                           | Orang/<br>Bulan | 261                                              | 59                                            | 59                                   | 100                    |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan<br>Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                          | Dokumen         | 10                                               | 2                                             | 2                                    | 100                    |

**RANCANGAN AWAL (RANWAL) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**



| Kode |    |    |      |      | Urusan Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Kinerja                                                                                                                                    | Satuan  | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Akhir<br>Renstra | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Tahun<br>2025 | Capaian Target Renstra<br>Tahun 2025 |                        |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                 |                                                                                                                                                      |         |                                                  |                                               | Realisasi<br>Capaian                 | Tingkat<br>Capaian (%) |
| 1    |    |    |      |      | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                    | 4       | 5                                                | 6                                             | 7                                    | 8                      |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Laporan | 8                                                | -                                             | -                                    | -                      |
| 1    | 05 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             | Dokumen | 4                                                |                                               |                                      |                        |
| 1    | 05 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                               | Paket   | 3                                                | -                                             | -                                    | -                      |
| 1    | 05 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                  | Orang   | 19                                               | -                                             | -                                    | -                      |
| 1    | 05 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan                                                             | Orang   | 19                                               | -                                             | -                                    | -                      |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                     | Dokumen | 5                                                |                                               |                                      |                        |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                       | Paket   | 8                                                | -                                             | -                                    | -                      |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                  | Paket   | 10                                               | 1                                             | 1                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                   | Paket   | 7                                                | 1                                             | 1                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                            | Paket   | 6                                                | 1                                             | 1                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/ Material                                                      | Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan                                                                                                         | Paket   | 9                                                | 1                                             | 1                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                             | Laporan | 6                                                | 1                                             | 1                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                  | Laporan | 9                                                | 1                                             | 1                                    | 100                    |

**RANCANGAN AWAL (RANWAL) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**



| Kode |    |    |      |      | Urusan Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                            | Satuan  | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Akhir<br>Renstra | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Tahun<br>2025 | Capaian Target Renstra<br>Tahun 2025 |                        |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                                  |                                               | Realisasi<br>Capaian                 | Tingkat<br>Capaian (%) |
| 1    |    |    |      |      | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                            | 4       | 5                                                | 6                                             | 7                                    | 8                      |
| 1    | 05 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                                                      | Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | Dokumen | 5                                                |                                               |                                      |                        |
| 1    | 05 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                                                            | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan<br>lainnya yang di sediakan                                          | Unit    | 10                                               | 2                                             | 2                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Dokumen | 5                                                |                                               |                                      |                        |
| 1    | 05 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | Laporan | 10                                               | 2                                             | 2                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan<br>dan perlengkapan kantor yang disediakan                          | Laporan | 2                                                | -                                             | -                                    | -                      |
| 1    | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantoryang Disediakan                                       | Laporan | 10                                               | 2                                             | 2                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                 | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                   | Dokumen | 5                                                |                                               |                                      |                        |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan<br>Dibayarkan Pajaknya | Unit    | 110                                              | 22                                            | 22                                   | 100                    |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                 | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang<br>dipelihara                                                        | Unit    | 146                                              | 17                                            | 17                                   | 100                    |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                             | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                    | Unit    | 6                                                | -                                             | -                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan Bangunan<br>Lainnya                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan<br>Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                                 | Unit    | 12                                               | 1                                             | 1                                    | 100                    |

**RANCANGAN AWAL (RANWAL) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**



| Kode |    |    |      |      | Urusan Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                           | Satuan  | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Akhir<br>Renstra | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Tahun<br>2025 | Capaian Target Renstra<br>Tahun 2025 |                        |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                  |                                               | Realisasi<br>Capaian                 | Tingkat<br>Capaian (%) |
| 1    |    |    |      |      | 2                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5                                                | 6                                             | 7                                    | 8                      |
| 1    | 05 | 03 |      |      | PROGRAM PENANGGULANGAN<br>BENCANA                                                                     | Indeks Pencegahan Bencana                                                                                                                                                                                                                                   | Indeks  | 2,84                                             | 2,70                                          | 2,99                                 | 110,74                 |
|      |    |    |      |      |                                                                                                       | Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan<br>Penanganan Darurat Bencana                                                                                                                                                                                            | Indeks  | 0,36                                             | 0,27                                          | 0,27                                 | 96,43                  |
|      |    |    |      |      |                                                                                                       | Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan<br>Bencana                                                                                                                                                                                                             | Indeks  | 0,63                                             | 0,47                                          | 0,47                                 | 87,04                  |
| 1    | 05 | 03 | 1.01 |      | Pelayanan Informasi Rawan<br>Bencana Provinsi                                                         | Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan<br>Bencana Provinsi                                                                                                                                                                                                | Dokumen | 5                                                |                                               |                                      |                        |
| 1    | 05 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Kajian Risiko<br>Bencana Provinsi                                                          | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang<br>Dilegalkan                                                                                                                                                                                                     | Dokumen | 1                                                | -                                             | -                                    | -                      |
| 1    | 05 | 03 | 1.01 | 0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi<br>dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana<br>Provinsi (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Tersedia untuk<br>Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana<br>(Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota                                                                                                                                | Orang   | 440                                              | -                                             | -                                    | -                      |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 |      | Pelayanan Pencegahan dan<br>Kesiapsiagaan terhadap Bencana                                            | Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan<br>Kesiapsiagaan terhadap Bencana                                                                                                                                                                                   | Dokumen | 37                                               |                                               |                                      |                        |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 | 0013 | Penguatan Kapasitas Kawasan<br>untuk Pencegahan dan<br>Kesiapsiagaan Bencana                          | Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan<br>bencana (per jenis ancaman bencana) dan/<br>atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/<br>Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur<br>tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana                                    | Kawasan | 7                                                | -                                             | -                                    | -                      |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 | 0022 | Penyusunan Rencana<br>Penanggulangan Kedaruratan<br>Bencana                                           | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan<br>Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan                                                                                                                                                                         | Dokumen | 1                                                | -                                             | -                                    | -                      |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 | 0023 | Gladi Kesiapsiagaan terhadap<br>Bencana                                                               | Jumlah warga negara dan aparaturnya di<br>kawasan risiko bencana tinggi lintas<br>Kabupaten/ Kota yang terlibat geladi<br>kesiapsiagaan mengetahui dan memahami<br>mekanisme dan prosedur tetap (SOP)<br>pengendalian operasi penanganan darurat<br>bencana | Orang   | 130                                              | -                                             | -                                    | -                      |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 | 0024 | Penyusunan Rencana<br>Penanggulangan Bencana                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan<br>Bencana yang Dilegalkan                                                                                                                                                                                            | Dokumen | 1                                                | -                                             | -                                    | -                      |

**RANCANGAN AWAL (RANWAL) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**



| Kode |    |    |      |      | Urusan Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                      | Satuan   | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Akhir<br>Renstra | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Tahun<br>2025 | Capaian Target Renstra<br>Tahun 2025 |                        |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |          |                                                  |                                               | Realisasi<br>Capaian                 | Tingkat<br>Capaian (%) |
| 1    |    |    |      |      | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                      | 4        | 5                                                | 6                                             | 7                                    | 8                      |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 | 0025 | Penyusunan Rencana Kontijensi                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas                                                                                                             | Dokumen  | 5                                                | -                                             | -                                    | -                      |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 | 0026 | Pengelolaan Risiko Bencana                                                          | Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/ kota yang tertangani                                                                                                                              | Kegiatan | 5                                                | 1                                             | 1                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 | 0027 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana                               | Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana                                                                                        | Orang    | 170                                              | -                                             | -                                    | -                      |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 | 0028 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana                         | Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                     | Keluarga | 590                                              | 10                                            | 10                                   | 100                    |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 | 0029 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana  | Dokumen  | 7                                                | 1                                             | 1                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 | 0030 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                           | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/ Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana | Orang    | 260                                              | 40                                            | 40                                   | 100                    |
| 1    | 05 | 03 | 1.03 |      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                  | Jumlah Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                                      | Dokumen  | 32                                               |                                               |                                      |                        |
| 1    | 05 | 03 | 1.03 | 0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas                 | Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas                                                                                                    | Laporan  | 4                                                | -                                             | -                                    | -                      |
| 1    | 05 | 03 | 1.03 | 0025 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana                                  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                          | Laporan  | 7                                                | 1                                             | 1                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 03 | 1.03 | 0026 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam                                    | Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki                                                                                                                            | Orang    | 100                                              | -                                             | -                                    | -                      |

**RANCANGAN AWAL (RANWAL) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**



| Kode |    |    |      |      | Urusan Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                     | Satuan   | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Akhir<br>Renstra | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Tahun<br>2025 | Capaian Target Renstra<br>Tahun 2025 |                        |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                  |                                               | Realisasi<br>Capaian                 | Tingkat<br>Capaian (%) |
| 1    |    |    |      |      | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5                                                | 6                                             | 7                                    | 8                      |
|      |    |    |      |      | penanganan keadaan darurat Provinsi                                                       | kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis                                                                                                                                                                                |          |                                                  |                                               |                                      |                        |
| 1    | 05 | 03 | 1.03 | 0027 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit                                                                                                                                                                      | Laporan  | 4                                                | -                                             | -                                    | -                      |
| 1    | 05 | 03 | 1.03 | 0028 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                              | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                                                   | Orang    | 1470                                             | 100                                           | 100                                  | 100                    |
| 1    | 05 | 03 | 1.03 | 0029 | Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi                                   | Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/ legal                                                                                                                                                                                            | Dokumen  | 1                                                | -                                             | -                                    | -                      |
| 1    | 05 | 03 | 1.03 | 0030 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                                                                                                                                                    | Laporan  | 20                                               | 2                                             | 2                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 03 | 1.03 | 0031 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                                                                                                                                         | Laporan  | 6                                                | 1                                             | 1                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 03 | 1.04 |      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                              | Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                           | Dokumen  | 38                                               |                                               |                                      |                        |
| 1    | 05 | 03 | 1.04 | 0006 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                                                                                                                                | Keluarga | 280                                              | 1                                             | 1                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 03 | 1.04 | 0007 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi                                                         | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun                                                                                                             | Dokumen  | 8                                                | 1                                             | 1                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 03 | 1.04 | 0009 | Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi                                               | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan                                                                                         | Kegiatan | 5                                                | 1                                             | 1                                    | 100                    |
| 1    | 05 | 03 | 1.04 | 0010 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi | Lembaga  | 120                                              | -                                             | -                                    | -                      |

**RANCANGAN AWAL (RANWAL) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**



| Kode |    |    |      |      | Urusan Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                   | Satuan    | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Akhir<br>Renstra | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Tahun<br>2025 | Capaian Target Renstra<br>Tahun 2025 |   |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1    |    |    |      |      | 2                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5                                                | 6                                             | 7                                    | 8 |
|      |    |    |      |      |                                                                                                       | keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal                                                                                                                         |           |                                                  |                                               |                                      |   |
| 1    | 05 | 03 | 1.04 | 0013 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi                                                               | Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | Orang     | 40                                               | -                                             | -                                    | - |
| 1    | 05 | 03 | 1.04 | 0016 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah                                                     | Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah                                                                                                                                                          | Dokumen   | 2                                                | -                                             | -                                    | - |
| 1    | 05 | 03 | 1.04 | 0018 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah                                                                  | Jumlah Dokumen yang dilegalkan                                                                                                                                                                                                      | Dokumen   | 4                                                | -                                             | -                                    | - |
| 1    | 05 | 03 | 1.04 | 0022 | Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                                  | Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)                                                                                                                 | Dokumen   | 4                                                | -                                             | -                                    | - |
| 1    | 05 | 03 | 1.04 | 0023 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota                                                                                  | Kab/ Kota | 28                                               | -                                             | -                                    | - |
| 1    | 05 | 03 | 1.04 | 0024 | Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor                                                       | Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)                                           | Dokumen   | 4                                                | -                                             | -                                    | - |

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 secara keseluruhan dengan Predikat Sangat Baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 2 (dua) Program dari Capaian Indikator Kinerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang tertuang dalam RPJMD Gubernur Priode 2025-2029 kemudian di tuangkan dalam Restra OPD, dari 6 (Enam) Indikator Kinerja Program yang harus dicapai tahun 2025 secara keseluruhan Indikator Kinerja Program sudah dapat terpenuhi.

Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang masing-masing memiliki 3 (tiga) Indikator, telah mencapai target.

Secara rinci capaian kinerja Indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2.**  
*Pencapaian Kinerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau*

| No | Tujuan, Sasaran dan Program                                 | Indikator                                                     | Satuan   | Rencana    | Realisasi  | Proyeksi   |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
|    |                                                             |                                                               |          | Tahun 2025 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| 1  | 2                                                           | 3                                                             | 4        | 5          | 6          | 7          |
| 1. | Tujuan :<br>Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Indeks Risiko Bencana                                         | Indeks   | 109,00     | 132,68     | 108,00     |
| 2. | Sasaran :<br>Meningkatnya Kualitas Kapasitas Daerah         | Indeks Ketahanan Daerah                                       | Angka    | 0,46       | 0,47       | 0,47       |
| 3. | Program :<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                  | Predikat | BB         | BB         | BB         |
|    |                                                             | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah   | Indeks   | 87,00      | 83,00      | 88,00      |
|    |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat                                    | Indeks   | 87,75      | 87,64      | 88,00      |
| 4. | Program :<br>Penanggulangan Bencana                         | Indeks Pencegahan Bencana                                     | Indeks   | 2,70       | 2,99       | 2,72       |
|    |                                                             | Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana | Indeks   | 0,28       | 0,27       | 0,29       |
|    |                                                             | Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana                  | Indeks   | 0,54       | 0,47       | 0,55       |

### **2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
  - 1) Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana;
  - 2) Masih terdapat beberapa Dokumen urusan Kebencanaan yang belum disusun dan legal;
  - 3) Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
  - 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - 5) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
  - 6) Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
  - 7) Belum tersosialisasikan secara luas paradigma baru Penanggulangan Bencana;

- b. Tantangan dalam menurunkan Ancaman Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tantangan untuk mendorong dalam memecahkan isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi:
- 1) Kondisi alam dan sosial yang rawan terjadi bencana;
  - 2) Terjadinya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;
  - 3) Tingkat pemahaman masyarakat belum merata mengenai paradigma Penanggulangan Bencana;
  - 4) Pertumbuhan dan penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau memiliki jangkauan yang sangat luas;
  - 5) Luas wilayah perairan yang lebih besar di bandingkan dengan daratan;
  - 6) Memiliki potensi bencana iklim yang sangat besar.
  - 7) Kurangnya penganggaran pada Program Penanggulangan Bencana, sehingga sangat berpengaruh pada penilaian Indikator Kinerja Utama.
- c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
- 1) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
  - 2) Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan;
  - 3) Adanya dukungan dari lembaga/instansi pemerintahan yang terkait;
  - 4) Adanya dukungan Pemerintah Pusat;
  - 5) Adanya nilai gotong royong, kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan perangkat daerah provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian kinerja perlindungan masyarakat.
- b. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

#### **2.4 Rancangan Awal RKPD**

Program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau ini direncanakan untuk pencapaian visi misi kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kepulauan Riau 2025 – 2029 dalam urusan penanggulangan bencana sebagaimana indikator - indiaktor yang telah ditetapkan, serta penjabaran Rencana Strategis BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Namun, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Penanggulangan Bencana dalam Perspektif RPJMN 2025 – 2029 terdapat dalam Prioritas nasional Ke – 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan Indikator Capaian : Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB dari 0,1370 menjadi 0,1350.

Sasaran Pembangunan RPJMN 2025 – 2029 : Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mewujudkan Sasaran Pembangunan RPJMN melalui Peraturan BNPB RI Nomor 5 tahun 2025 Tentang RENSTRA BNPB Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Program : Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna, dengan Indikator Capaian : Persentase Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana 1,2% setiap tahun

**Gambar. 3.1.**  
*Penyelarasan Visi Presiden dan RPJMN  
dengan Visi, Misi, dan Tujuan pada Renstra BNPB*



**Tabel. 3.1.**  
*Rancangan Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis  
 BNPB 2025-2029*

| Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja Sasaran Strategis                                                              | 2025  | 2026  | 2027 | 2028  | 2029 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|------|
| Resiliensi Terhadap Bencana            | Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Nasional                                                   | 1,2%  | 1,2%  | 1,2% | 1,2%  | 1,2% |
|                                        | Persentase Daerah yang Memiliki Tingkat Kapasitas Penanggulangan Bencana Minimal Kategori Sedang | 67%   | 73%   | 79%  | 85%   | 90%  |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BNPB | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                       | 77,18 | 77,50 | 78   | 78,50 | 79   |

**Tabel. 3.2.**  
*Rancangan Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program  
 Program BNPB 2025-2029*

| Unit Kerja                                     | Sasaran Program                                                                                                             | Indikator Kinerja Sasaran Program                                                                                            | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Deputi Bidang Sistem dan Strategi              | Meningkatnya Sinkronisasi Pengembangan Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana Secara Terpadu dan Inovatif               | Persentase rekomendasi kebijakan sistem dan strategi PB yang diintegrasikan oleh K/L/D ke dalam rencana pembangunan/sektoral | 87,06% | 90,59% | 94,12% | 97,65% | 100%   |
| Deputi Bidang Pencegahan                       | Meningkatnya kualitas masyarakat yang Tangguh terhadap bencana di kawasan berisiko bencana                                  | Persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana                                                        | 6,10%  | 6,17%  | 6,21%  | 6,26%  | 6,32%  |
|                                                |                                                                                                                             | Persentase desa berketahanan bencana multipihak                                                                              | 10,49% | 10,75% | 11,07% | 11,46% | 11,74% |
|                                                |                                                                                                                             | Persentase cakupan layanan mitigasi bencana di daerah berisiko bencana                                                       | 7,39%  | 10,12% | 13,04% | 15,95% | 18,87% |
| Deputi Bidang Penanganan Darurat               | Meningkatnya manajemen penanganan darurat saat kejadian bencana                                                             | Persentase Daerah yang menetapkan status keadaan darurat bencana yang mendapatkan intervensi sesuai standar                  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| Kedeputan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Meningkatnya kualitas layanan pemulihan pascabencana sektor permukiman infrastruktur sosial, ekonomi dan lintas sektor      | Persentase Daerah pascabencana masif yang ditangani                                                                          | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| Unit Kerja                                     | Sasaran Program                                                                                                             | Indikator Kinerja Sasaran Program                                                                                            | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| Kedeputan Bidang Logistik dan Peralatan        | Meningkatnya ketahanan logistik dan peralatan yang berkelanjutan dalam mendukung penanggulangan bencana berdasarkan wilayah | Persentase daerah yang difasilitasi logistik dan peralatan PB serta sumber daya manusia yang mampu pengelola                 | 35%    | 45%    | 55%    | 65%    | 75%    |
| Sekretariat Utama                              | Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan         | Nilai Reformasi Birokrasi                                                                                                    | 77,18  | 77,50  | 78     | 78,50  | 79     |
| Inspektorat Utama                              | Meningkatnya Pengawasan yang akuntabel dan transparan                                                                       | Skor Kapabilitas APIP                                                                                                        | 3,05   | 3,1    | 3,15   | 3,2    | 3,25   |
|                                                |                                                                                                                             | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI                                                                            | 75%    | 75%    | 75%    | 75%    | 75%    |
|                                                |                                                                                                                             | Persentase pelaksanaan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat                                                                    | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
|                                                |                                                                                                                             | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP                                                                               | 46%    | 52%    | 58%    | 64%    | 70%    |

Arah kebijakan Renstra BNPB 2025–2029

1. Menjadi acuan bagi BPBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam menyusun Renstra Daerah 2026-2030, terutama terkait indikator kinerja penanggulangan bencana;
2. Setiap provinsi diharapkan mampu menurunkan Indeks Risiko Bencana sebesar 1,2% per tahun melalui program dan kegiatan yang terarah dan terukur;
3. Pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan kategori Indeks Kapasitas Daerah (IKD) sehingga mayoritas Kabupaten/ Kota mencapai kategori sedang, sesuai target kinerja dalam RPJMN;
4. Dengan komitmen bersama, sinkronisasi Renstra BNPB dan BPBD akan memperkuat kolaborasi, mempercepat capaian target nasional, serta mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh menghadapi bencana menuju Indonesia Emas 2045

### **3.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan pada Rencana Strategis perangkat Daerah merupakan sebuah penjabaran atau implementsai dari pernyataan misi dan tujuan serta sasaran yang termuat dalam RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran pada rencana strategis merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yaitu:

#### **“Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim”**

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang akan dicapai oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2025-2029 yaitu:

**“Meningkatnya Kualitas Kapasitas Daerah”**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

**Tabel. 3.3.**  
*Tujuan dan Sasaran*  
*Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029*

| No | Tujuan dan Sasaran                                       | Indikator               | Satuan | Target Renstra 2025 - 2029 |            |            |            |            |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                          |                         |        | Tahun 2025                 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 |
| 1  | 2                                                        | 3                       | 4      | 5                          | 6          | 7          | 8          | 9          |
| 1. | Tujuan : Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Indeks Risiko Bencana   | Indeks | 109,00                     | 108,00     | 106,50     | 106,00     | 105,00     |
| 2. | Sasaran : Meningkatkan Kualitas Kapasitas Daerah         | Indeks Ketahanan Daerah | Angka  | 0,46                       | 0,47       | 0,49       | 0,51       | 0,53       |

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau ini direncanakan untuk pencapaian visi misi kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kepulauan Riau 2025 – 2029 dalam urusan penanggulangan bencana sebagaimana indikator - indiaktor yang telah ditetapkan. Selain itu rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini diusulkan untuk pencapaian dan mensukseskan program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025 – 2029.

Pada Ranwal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi kepulauan Riau tahun 2024 ini diusulkan 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan, Ranwal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan

Riau tahun 2027 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029.

**Tabel. 3.4.**  
*Program dan Indikator Program*  
*Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029*

| No | Tujuan, Sasaran dan Program                           | Indikator                                                     | Satuan   | Target Renstra 2025 - 2029 |            |            |            |            |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                       |                                                               |          | Tahun 2025                 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 |
| 1  | 2                                                     | 3                                                             | 4        | 5                          | 6          | 7          | 8          | 9          |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                  | Predikat | BB                         | BB         | BB         | BB         | A          |
|    |                                                       | Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah   | Indeks   | 87,00                      | 88,00      | 89,00      | 90,00      | 91,00      |
|    |                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat                                    | Indeks   | 87,75                      | 88,00      | 89,50      | 90,00      | 90,25      |
| 2. | Program Penanggulangan Bencana                        | Indeks Pencegahan Bencana                                     | Indeks   | 2,70                       | 2,72       | 2,76       | 2,80       | 2,84       |
|    |                                                       | Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana | Indeks   | 0,28                       | 0,29       | 0,31       | 0,33       | 0,36       |
|    |                                                       | Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana                  | Indeks   | 0,54                       | 0,55       | 0,58       | 0,61       | 0,63       |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Awal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2027, Berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029, yang merupakan turunan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029.

Dokumen Renstra dan RPJMD Merupakan penjabaran dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara keseluruhan pada Ranwal Renja Tahun Anggaran 2027 sebesar **Rp. 12.979.053.282,- (Dua belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah,-)** dengan pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2027, Khusus Gaji ASN dan PPPK dibebankan kepada APBN/ Transfer Dana Alokasi Umum (DAU), Rencana Kerja dan Pendanaan dapat dilihat melalui penjabaran pada Tabel 4.1. berikut:

**RANCANGAN AWAL (RANWAL) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

**Tabel 4.1.**  
*RANWAL Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta pendanaan Tahun 2027*

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Ranwal Tahun 2027                                                             |                      |                           |                                                          | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028 |                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Lokasi                                                                        | Target Kinerja       | Kebutuhan Dana (Rp)       | Sumber Dana                                              | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana            |
| 1                 | 2                                                                                                | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                                             | 5                    | 6                         | 7                                                        | 9                                 | 10                        |
| 1                 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                               |                      |                           |                                                          |                                   |                           |
| 1.05              | Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |                                                                                                                                                                        |                                                                               |                      |                           |                                                          |                                   |                           |
| 1.05.01           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                            | Nilai SAKIP Perangkat Daerah<br>Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah<br>Indeks Kepuasan Masyarakat                                              | Provinsi Kepulauan Riau<br>Provinsi Kepulauan Riau<br>Provinsi Kepulauan Riau | BB<br>89,00<br>89,50 | 9.370.615.103<br><br><br> | Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | BB<br>89,00<br>89,50              | 9.855.615.103<br><br><br> |
| 1.05.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | Provinsi Kepulauan Riau                                                       | 4 Dokumen            | 110.000.000               | Pendapatan Asli Daerah (PAD)                             | 4 Dokumen                         | 250.000.000               |
| 1.05.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Provinsi Kepulauan Riau                                                       | 3 Dokumen            | 60.000.000                | Pendapatan Asli Daerah (PAD))                            | 3 Dokumen                         | 160.000.000               |
| 1.05.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                                                                               | -                    | -                         |                                                          | 2 Dokumen                         | 30.000.000                |
| 1.05.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                               | 2 Laporan            | 20.000.000                |                                                          | 2 Laporan                         | 20.000.000                |
| 1.05.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                               | 4 Laporan            | 30.000.000                |                                                          | 4 Laporan                         | 30.000.000                |
| 1.05.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                           | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                  | Provinsi Kepulauan Riau                                                       | 3 Dokumen            | 8.050.615.103             | DAU dan PAD                                              | 3 Dokumen                         | 8.140.615.103             |
| 1.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Provinsi Kepulauan Riau                                                       | 59 Orang/ Bulan      | 7.834.051.441             | DAU dan PAD                                              | 59 Orang/ Bulan                   | 7.834.051.441             |
| 1.05.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                                                                               | 2 Dokumen            | 186.563.662               | Pendapatan Asli Daerah (PAD)                             | 2 Dokumen                         | 266.563.662               |
| 1.05.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                   |                                                                               | 2 Laporan            | 30.000.000                |                                                          | 2 Laporan                         | 40.000.000                |
| 1.05.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                               | Provinsi Kepulauan Riau                                                       | 1 Dokumen            | 60.000.000                | PAD                                                      | 1 Dokumen                         | 120.000.000               |

**RANCANGAN AWAL (RANWAL) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                        | Ranwal Tahun 2027       |                |                     |                              | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028 |                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                   |                                                                               |                                                                                          | Lokasi                  | Target Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp) | Sumber Dana                  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana |
| 1                 | 2                                                                             | 3                                                                                        | 4                       | 5              | 6                   | 7                            | 9                                 | 10             |
| 1.05.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                   | Provinsi Kepulauan Riau | -              | -                   | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 2 Paket                           | 40.000.000     |
| 1.05.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan      |                         | 3 Orang        | 30.000.000          |                              | 4 Orang                           | 40.000.000     |
| 1.05.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan |                         | 3 Orang        | 30.000.000          |                              | 4 Orang                           | 40.000.000     |
| 1.05.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Provinsi Kepulauan Riau | 1 Dokumen      | 360.000.000         | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 1 Dokumen                         | 440.000.000    |
| 1.05.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                           | Provinsi Kepulauan Riau | 2 Paket        | 30.000.000          | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 2 Paket                           | 50.000.000     |
| 1.05.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                      |                         | 2 Paket        | 20.000.000          |                              | 2 Paket                           | 20.000.000     |
| 1.05.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                       |                         | 1 Paket        | 20.000.000          |                              | 1 Paket                           | 20.000.000     |
| 1.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                |                         | 1 Paket        | 10.000.000          |                              | 1 Paket                           | 10.000.000     |
| 1.05.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/ Material                                                    | Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan                                             |                         | 2 Paket        | 20.000.000          |                              | 2 Paket                           | 30.000.000     |
| 1.05.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                 |                         | 1 Laporan      | 10.000.000          |                              | 1 Laporan                         | 10.000.000     |
| 1.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |                         | 2 Laporan      | 250.000.000         |                              | 2 Laporan                         | 300.000.000    |
| 1.05.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah              | Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | Provinsi Kepulauan Riau | 1 Dokumen      | 160.000.000         | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 1 Dokumen                         | 160.000.000    |
| 1.05.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                          | Provinsi Kepulauan Riau | 2 Unit         | 160.000.000         | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 2 Unit                            | 160.000.000    |
| 1.05.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Provinsi Kepulauan Riau | 1 Dokumen      | 290.000.000         | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 1 Dokumen                         | 355.000.000    |
| 1.05.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Provinsi Kepulauan Riau | 2 Laporan      | 210.000.000         | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 2 Laporan                         | 210.000.000    |
| 1.05.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan         |                         | -              | -                   |                              | 1 Laporan                         | 35.000.000     |
| 1.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                     |                         | 2 Laporan      | 80.000.000          |                              | 2 Laporan                         | 110.000.000    |

**RANCANGAN AWAL (RANWAL) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                            | Ranwal Tahun 2027              |                |                      |                                     | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028 |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | Lokasi                         | Target Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp)  | Sumber Dana                         | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana       |
| 1                 | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                              | 5              | 6                    | 7                                   | 9                                 | 10                   |
| 1.05.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                         | Provinsi Kepulauan Riau        | 1 Dokumen      | 340.000.000          | Pendapatan Asli Daerah (PAD)        | 1 Dokumen                         | 390.000.000          |
| 1.05.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                                                       | Provinsi Kepulauan Riau        | 22 Unit        | 160.000.000          | Pendapatan Asli Daerah (PAD)        | 22 Unit                           | 170.000.000          |
| 1.05.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                           |                                | 30 Unit        | 20.000.000           |                                     | 30 Unit                           | 40.000.000           |
| 1.05.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                    |                                | 1 Unit         | 20.000.000           |                                     | 2 Unit                            | 40.000.000           |
| 1.05.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                                                                                                                                    |                                | 3 Unit         | 140.000.000          |                                     | 3 Unit                            | 140.000.000          |
| <b>1.05.03</b>    | <b>Program Penanggulangan Bencana</b>                                                                              | <b>Indeks Pencegahan Bencana</b>                                                                                                                                                                             | <b>Provinsi Kepulauan Riau</b> | <b>2,76</b>    | <b>3.608.438.179</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> | <b>2,80</b>                       | <b>3.772.390.843</b> |
|                   |                                                                                                                    | <b>Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana</b>                                                                                                                                         |                                | <b>0,31</b>    |                      |                                     | <b>0,33</b>                       |                      |
|                   |                                                                                                                    | <b>Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan</b>                                                                                                                                                                  |                                | <b>0,58</b>    |                      |                                     | <b>0,61</b>                       |                      |
| 1.05.03.1.01      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                                                                         | Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                                                                                                                                                    | Provinsi Kepulauan Riau        | 2 Dokumen      | 900.000.000          | Pendapatan Asli Daerah (PAD)        | 1 Dokumen                         | 100.000.000          |
| 1.05.03.1.01.0003 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi                                                                          | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan                                                                                                                                                         | Provinsi Kepulauan Riau        | 1 Dokumen      | 800.000.000          | Pendapatan Asli Daerah (PAD)        | -                                 | -                    |
| 1.05.03.1.01.0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)                    | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota                                                                                       |                                | 40 Orang       | 100.000.000          |                                     | 40 Orang                          | 100.000.000          |
| 1.05.03.1.02      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana                                                            | Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana                                                                                                                                       | Provinsi Kepulauan Riau        | 9 Dokumen      | 1.248.438.179        | Pendapatan Asli Daerah (PAD)        | 9 Dokumen                         | 1.380.000.000        |
| 1.05.03.1.02.0013 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana                                             | Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | Provinsi Kepulauan Riau        | 1 Kawasan      | 100.000.000          | Pendapatan Asli Daerah (PAD)        | 2 Kawasan                         | 150.000.000          |
| 1.05.03.1.02.0022 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana                                                              | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan                                                                                                                             |                                | -              | -                    |                                     | 1 Dokumen                         | 180.000.000          |
| 1.05.03.1.02.0023 | Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana                                                                               | Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas                                                                                                                                     |                                | 40 Orang       | 100.000.000          |                                     | 40 Orang                          | 100.000.000          |

**RANCANGAN AWAL (RANWAL) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                     | Ranwal Tahun 2027       |                |                     |                              | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028 |                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | Lokasi                  | Target Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp) | Sumber Dana                  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana |
| 1                 | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                       | 5              | 6                   | 7                            | 9                                 | 10             |
|                   |                                                                                     | Kabupaten/ Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana                                         |                         |                |                     |                              |                                   |                |
| 1.05.03.1.02.0024 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana                                           | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan                                                                                                                                         | Provinsi Kepulauan Riau | 1 Dokumen      | 300.000.000         | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | -                                 | -              |
| 1.05.03.1.02.0025 | Penyusunan Rencana Kontijensi                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas                                                                                                            |                         | 1 Dokumen      | 254.053.282         |                              | 1 Dokumen                         | 300.000.000    |
| 1.05.03.1.02.0026 | Pengelolaan Risiko Bencana                                                          | Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/ kota yang tertangani                                                                                                                             |                         | 1 Kegiatan     | 100.000.000         |                              | 1 Kegiatan                        | 100.000.000    |
| 1.05.03.1.02.0027 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana                               | Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana                                                                                       |                         | 40 Orang       | 150.000.000         |                              | 40 Orang                          | 150.000.000    |
| 1.05.03.1.02.0028 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana                         | Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                    |                         | 80 Keluarga    | 100.000.000         |                              | 200 Keluarga                      | 250.000.000    |
| 1.05.03.1.02.0029 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana |                         | 1 Dokumen      | 50.000.000          |                              | 1 Dokumen                         | 50.000.000     |
| 1.05.03.1.02.0030 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                           | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/ Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana     |                         | 40 Orang       | 94.384.897          |                              | 40 Orang                          | 100.000.000    |
| 1.05.03.1.03      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                  | Jumlah Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                                     | Provinsi Kepulauan Riau | 7 Dokumen      | 680.000.000         | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 8 Dokumen                         | 1.070.000.000  |
| 1.05.03.1.03.0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas                 | Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas                                                                                                   | Provinsi Kepulauan Riau | 1 Laporan      | 20.000.000          | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 1 Laporan                         | 20.000.000     |

**RANCANGAN AWAL (RANWAL) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                | Ranwal Tahun 2027       |                |                     |                              | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028 |                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                  | Lokasi                  | Target Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp) | Sumber Dana                  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana |
| 1                 | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                                | 4                       | 5              | 6                   | 7                            | 9                                 | 10             |
| 1.05.03.1.03.0025 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana                                        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                    | Provinsi Kepulauan Riau | 1 Laporan      | 50.000.000          | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 1 Laporan                         | 50.000.000     |
| 1.05.03.1.03.0026 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi      | Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis               |                         | 20 Orang       | 80.000.000          |                              | 40 Orang                          | 150.000.000    |
| 1.05.03.1.03.0027 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit                                                                                 |                         | 1 Laporan      | 20.000.000          |                              | 1 Laporan                         | 20.000.000     |
| 1.05.03.1.03.0028 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                              | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                              |                         | 200 Orang      | 400.000.000         |                              | 300 Orang                         | 480.000.000    |
| 1.05.03.1.03.0029 | Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi                                   | Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/ legal                                                                                                       |                         | -              | -                   |                              | 1 Dokumen                         | 200.000.000    |
| 1.05.03.1.03.0030 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                                                               |                         | 4 Laporan      | 80.000.000          |                              | 4 Laporan                         | 100.000.000    |
| 1.05.03.1.03.0031 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                                                    |                         | 1 Laporan      | 30.000.000          |                              | 1 Laporan                         | 50.000.000     |
| 1.05.03.1.04      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                              | Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                                      | Provinsi Kepulauan Riau | 9 Dokumen      | 780.000.000         | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 10 Dokumen                        | 1.222.390.843  |
| 1.05.03.1.04.0006 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                                           | Provinsi Kepulauan Riau | 40 Keluarga    | 80.000.000          | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 80 Keluarga                       | 200.000.000    |
| 1.05.03.1.04.0007 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi                                                         | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun                        |                         | 2 Dokumen      | 270.000.000         |                              | 2 Dokumen                         | 350.000.000    |
| 1.05.03.1.04.0009 | Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi                                               | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan    |                         | 1 Kegiatan     | 50.000.000          |                              | 1 Kegiatan                        | 50.000.000     |
| 1.05.03.1.04.0010 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, |                         | 40 Lembaga     | 80.000.000          |                              | 40 Lembaga                        | 80.000.000     |

**RANCANGAN AWAL (RANWAL) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

| Kode              | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                   | Ranwal Tahun 2027       |                   |                       |                              | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028 |                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi                  | Target Kinerja    | Kebutuhan Dana (Rp)   | Sumber Dana                  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana        |
| 1                 | 2                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4                       | 5                 | 6                     | 7                            | 9                                 | 10                    |
|                   |                                                                                                       | lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal                                    |                         |                   |                       |                              |                                   |                       |
| 1.05.03.1.04.0013 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi                                                               | Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | Provinsi Kepulauan Riau | 40 Orang          | 100.000.000           | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 40 Orang                          | 100.000.000           |
| 1.05.03.1.04.0016 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah                                                     | Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah                                                                                                                                                          |                         | -                 | -                     |                              | 1 Dokumen                         | 200.000.000           |
| 1.05.03.1.04.0018 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah                                                                  | Jumlah Dokumen yang dilegalikan                                                                                                                                                                                                     |                         | 1 Dokumen         | 50.000.000            |                              | 1 Dokumen                         | 60.000.000            |
| 1.05.03.1.04.0022 | Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                                  | Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)                                                                                                                 |                         | 1 Dokumen         | 50.000.000            |                              | 1 Dokumen                         | 60.000.000            |
| 1.05.03.1.04.0023 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota                                                                                  |                         | 7 kabupaten/ Kota | 50.000.000            |                              | 7 kabupaten/ Kota                 | 60.000.000            |
| 1.05.03.1.04.0024 | Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor                                                       | Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)                                           |                         | 1 Dokumen         | 50.000.000            |                              | 1 Dokumen                         | 62.390.843            |
|                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TOTAL</b>            |                   | <b>12.979.053.282</b> | <b>TOTAL</b>                 |                                   | <b>13.628.005.946</b> |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 dan RENSTRA BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder penanggulangan bencana dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan tangguh bencana yang dilakukan oleh penanggulangan bencana Provinsi Kepulauan Riau.

Rancangan Awal Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 ini berisikan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan-kegiatan.

Dalam pelaksanaannya Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 ini perlu ditunjang dengan petunjuk operasional maupun rencana tindak lanjut yang lebih rinci untuk setiap item program/ kegiatannya. Dukungan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, masyarakat dan stakeholder Penanggulangan Bencana sangat diharapkan untuk menyukseskan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Januari 2026

**KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**Dr. MUHAMMAD HASBI, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196602281986021006